

Kemendagri Desak Pemda Cairkan Dana Pilkada



Sumber gambar :Kompas.id Selasa,16/07/2024

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah segera menyalurkan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah serta Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyaluran anggaran ini sangat penting mengingat tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada sudah berjalan.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas M Panjaitan menuturkan, hingga 12 Juli 2024, sebanyak 541 Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi, kabupaten, dan kota sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU. Nilai total anggarannya mencapai Rp28,73 triliun.

Akan tetapi, baru 277 Pemda di antaranya yang merealisasikan seluruh dana hibah Pilkada 2024 tersebut kepada KPU setempat. “Sementara (dari 277 Pemda itu) sebanyak 264 pemerintah daerah lainnya sudah menyalurkan, tapi belum sepenuhnya,” kata Horas dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada yang diselenggarakan secara daring, Senin (15/7/2024).

Selain terhadap KPU, Horas menyebutkan, 518 dari 541 Pemda sudah menandatangani NPHD dengan Bawaslu setempat dengan total anggaran sebesar Rp8,61 triliun. Namun, yang sudah merealisasikan NPHD baru 272 Pemda.

“Ada 246 Pemda yang belum sepenuhnya (merealisasikan anggaran), masih kurang dari 100 persen. Bahkan, ada yang di bawah 40 persen. Ini yang sebenarnya kami merasa khawatir,” tuturnya.

Adapun untuk TNI baru 387 dari 541 Pemda yang sudah menandatangani NPHD dengan total anggaran Rp936,95 miliar. Sebanyak 158 Pemda belum menandatangani NPHD.

Ia menyebutkan, sebanyak 200 Pemda sudah menyalurkan hibahnya kepada TNI dengan jumlah anggaran Rp567,43 miliar. Rinciannya, 173 Pemda sudah menyelesaikan penyaluran 100 persen dana hibah dan 23 Pemda sudah menyalurkan dana hibah, tetapi dengan jumlah masih di bawah besaran NPHD. Adapun empat Pemda belum merealisasikan penyaluran dana.

Untuk Polri terdapat 420 Pemda yang sudah menandatangani NPHD dengan besaran dana hibah Rp3 triliun. Dari jumlah itu, baru 251 Pemda yang sudah menyalurkan dana hibah, dengan rincian 204 Pemda sudah siapkan anggaran sebesar 100 persen dan 47 Pemda baru merealisasikan anggaran sebagian.

Menurut Horas, anggaran Pilkada terbagi dalam dua tahun anggaran, yakni 40 persen dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 serta 60 persen anggaran dari APBD 2024. Adapun kesepakatan anggaran dilakukan sekali melalui perjanjian NPHD.

Baru Tiga Provinsi

Horas mengapresiasi Pemda yang sudah merealisasikan seluruh dana hibah, seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ia meminta agar hal ini diikuti oleh Pemda lain mengingat sampai sekarang masih banyak yang baru menyalurkan dana hibah di bawah 40 persen. Menurut dia, batas realisasi anggaran Pilkada adalah akhir Juli 2024.

“Kami imbau bagi daerah yang sampai saat ini belum menyalurkan 100 persen dana Pilkada agar segera menyalurkan. KPUD (KPU daerah) sudah punya banyak tagihan. Jangan sampai persiapan, pengadaan, dan persiapan logistik Pilkada jadi terhambat,” ucapnya.

Kepala Bagian pada Biro Perencanaan dan Organisasi KPU M Krisdiono mengatakan, dari total anggaran sebesar Rp28,73 triliun yang jadi kesepakatan, 78 persen sudah disalurkan dari pemerintah daerah ke KPU di tiap daerah.

Ia menjelaskan, ada empat komponen krusial yang menjadi pengeluaran utama dalam pelaksanaan Pilkada. Keempat hal itu adalah honorarium penyelenggara Pemilu, kebutuhan pencalonan jalur perseorangan, logistik Pilkada, dan rekapitulasi hasil Pilkada.

“Untuk pencalonan butuh biaya cukup besar, terutama pencalonan jalur perseorangan. Kami harus memverifikasi dengan cara sensus, bukan lagi sampel, sehingga butuh biaya besar,” ujarnya.

Di luar keempat hal tersebut, biaya juga dibutuhkan untuk tahapan kampanye Pilkada, seperti untuk keamanan dan penertiban alat peraga kampanye.

Menurut dia, pelaksanaan Pilkada untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota yang dilakukan serentak bisa memangkas sebagian anggaran karena pemungutan suara dilakukan pada waktu bersamaan. Waktu kampanye yang lebih singkat dari Pilkada sebelumnya juga membuat anggaran jadi lebih efisien.

“KPU juga berupaya melakukan penghematan pengeluaran, antara lain dengan tidak mengizinkan perekrutan tenaga pendukung dan tidak mengizinkan adanya sewa kendaraan untuk efisiensi anggaran,” katanya. **(DNA)**

Sumber berita:

1. Kompas, Kemendagri Desak Pemda Cairkan Dana Pilkada, 16/07/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri 54/2019) bahwa pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
2. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri 54/2019, bahwa pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.